

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

(Survei pada Desa di Kabupaten Temanggung)

Sutan Hanif Hibatullah
Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Sutanhanif28@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the technical assistance, the utilization of information technology, on the accountability of village fund management through the competency of village apparatus in Temanggung District. This research is a quantitative study that uses primary data based on questionnaires distributed to each village office which is sample in Temanggung District. This research uses a purposive sampling method. The analysis that used in this study is multiple linear regression with SPSS 15.0. The results of this research indicate that the technical assistance and utilization of information technology had an influence on the competence of village apparatus. The utilization of information technology has an effect on the accountability of village fund management, but technical assistance has no effect on the accountability of village fund management. Technical assistance and utilization of information technology affect the accountability of village fund management through the competence of village apparatus. This study is expected to be used to realize accountability in village fund management.

Keywords: *Accountability of Village Fund Management, Village Apparatus Competence, Technical Assistance, The Utilization of Information Technology.*

LATAR BELAKANG

Pada era reformasi ini pemerintah mulai fokus untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan nasional dapat didefinisikan sebagai usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan yang berdasarkan kemampuan nasional dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta memperhatikan tantangan perkembangan global yang terjadi saat ini. Terwujudnya tujuan dari pembangunan itu sendiri bisa kita lihat dari desa. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, desa merupakan unit paling kecil dalam suatu pemerintahan, sehingga peran, fungsi dan kontribusinya menempati posisi yang strategis untuk menilai berhasil tidaknya suatu pembangunan tersebut.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dari penjelasan ini, desa memiliki kewenangan untuk mengelola dan menjalankan sistem pemerintahannya sendiri. Wewenang yang diperoleh diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia dan dapat menata desa dengan baik (Nadir, 2013).

Pembangunan yang dicanangkan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Untuk tahun 2015 dana yang dialokasikan ke desa yaitu Rp 20,7 triliun yang didistribusikan ke 74,093 desa (Munti, 2017). Untuk tahun 2016 dana yang dilokasikan ke desa yaitu sebesar Rp 46,9 Triliun (Setiana, 2017). Dan untuk tahun 2017 dana yang dialokasikan ke desa yaitu Rp 60 Triliun (Mada, 2017). Adanya Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan pembangunan, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, pembinaan masyarakat, dan pelaksanaan masyarakat.

Peran dan tanggungjawab yang diterima desa dalam hal pengelolaan keuangan desa ini sangat besar. Pengelolaan keuangan desa sendiri sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, dimana pengelolaan itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang tanggungjawab untuk menyampaikan pertanggungjawabannya, menyajikannya, serta mengungkapkannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada masyarakat (*Principal*) yang berhak dan memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya yang dipercayakan atas pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan dari organisasi (Temenggung, 2016).

Dalam kenyataannya ternyata penerapan akuntabilitas ini masih kurang dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan

Desa: Alokasi Dana Desa dan Dana Desa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan di lima sampel pada tahun 2015, diperoleh hasil bahwa akuntabilitas keuangan di desa masih rendah. KPK menemukan sejumlah temuan yang mengakibatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kelima sampel menjadi rendah. Temuan tersebut seperti laporan pertanggungjawaban belum mengikuti standar dan rawan manipulasi, rencana penggunaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan, dan Belanja Desa (APBDes) kurang transparan, dan adanya keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa.

Berdasarkan temuan KPK di atas, diketahui sumber daya manusia (SDM) yaitu dalam hal ini aparatur desa, dimana aparatur desa inilah yang mengelola keuangan desa yang dimulai dari proses perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan sampai pada proses pertanggungjawaban memiliki peran yang vital, sehingga aparatur yang kompeten sangat diperlukan. Untuk itu, terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa tidak lepas dari kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa (Mada, dkk. 2017). Faktor lain yang dapat memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa ialah bimbingan teknis (Wahyuningsih, 2016) dan pemanfaatan teknologi informasi (Komarasari, 2017).

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Wahyuningsih (2016), Komarasari (2017) dan Mada, dkk (2017). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu objek penelitian yang menggunakan sampel desa-desa di Kabupaten Temanggung. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung karena menurut Kajian Dana Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017 oleh Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, akuntabilitas di Kabupaten Temanggung masih kurang, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan dalam hal pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak valid. Perbedaan lainnya yaitu dalam penelitian ini menggunakan kompetensi aparatur desa sebagai variabel intervening. Alasan penggunaan variabel kompetensi aparatur desa adalah karena semakin sering aparatur desa mendapat bimbingan teknis dan memanfaatkan TI akan berdampak pada peningkatan kompetensi mereka dalam mengelola dana desa yang akan berakibat pada meningkatnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti mengambil judul “**Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa**”.

Dengan adanya banyak hal yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa, penulis memberikan batasan masalah yaitu, faktor - faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan variabel independen berupa bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi serta menggunakan variabel intervening berupa kompetensi aparatur desa.

LANDASAN TEORI DAN PENURUNAN HIPOTESIS

Teori Stewardship

Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *Stewardship* adalah teori yang menggambarkan manajemen tidak secara khusus termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi atau sasaran utama yang hendak dicapai. Teori ini lebih cocok digunakan pada instansi pemerintah yang dimana tidak berorientasi pada laba namun lebih condong kepada pelayanan yang baik untuk masyarakat sebagai prinsipalnya.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Mardiasmo (2009), Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi setiap pemegang tanggungjawab untuk menyampaikan pertanggungjawabannya, menyajikannya, serta mengungkapkannya pada setiap aktivitas yang dilakukan kepada pemberi amanah (*Principal*) yang berhak dan memiliki kewajiban untuk mendapatkan pertanggungjawaban.

Keuangan desa berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 adalah segala sesuatu mengenai hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengaruh bimbingan teknis terhadap kompetensi aparatur desa

Program bimbingan teknis atau pelatihan-pelatihan dilakukan guna mengembangkan serta meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari anggota organisasi agar kemampuan yang telah dimiliki semakin membaik. Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian proses seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Penelitian Bolung (2018) menyatakan terdapat hasil yang positif signifikan dalam pengaruh pelatihan terhadap kompetensi pegawai, dimana semakin ditingkatkan pelatihan yang diberikan kepada pegawai, maka kompetensi pegawai tersebut akan meningkat, yang akan mengakibatkan peningkatan pada kinerja pegawai.

H₁: Bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap kompetensi aparatur desa

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kompetensi aparatur desa

Dalam teori teknologi informasi yang diungkapkan Uno (2011), menyatakan teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, yang meliputi memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu. Penelitian Yusuf (2016) menyatakan adanya hasil positif signifikan pemanfaatan teknologi informasi terhadap keterandalan dan ketepatan waktu dalam pembuatan laporan keuangan, hal ini karena aparat dapat memanfaatkan TI dalam menjalankan tugasnya.

H₂: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kompetensi aparatur desa

Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Sesuai yang tertera dalam UU Desa, pemerintah pusat dan daerah turut membantu dalam hal pemberdayaan masyarakat desa dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, sehingga diperlukan suatu bimbingan teknis pengelolaan dana desa dimana nantinya akan meningkatkan kualitas pelaporan keuangannya, pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut Penelitian Wahyuningsih (2016), Kadir (2017), Azlina (2017), menunjukkan hasil yaitu bimbingan teknis berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin sering diadakan bimbingan teknis, akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa akan terwujud.

H₃: Bimbingan Teknis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Aparat yang kompeten akan menghasilkan *output* yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Pada saat pengambilan keputusan dalam penggunaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik, serta dapat memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban dari segala kegiatan yang dilakukannya dalam mengelola dana desa. Hal ini sejalan dengan *Stewardship theory* yang menyatakan manajer lebih termotivasi untuk memenuhi kepentingan organisasi dari pada kepentingan individu. Menurut Penelitian Mada, dkk. (2017), Sudiarianti, dkk. (2015), Irma (2015), menunjukkan hasil yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

H₄: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup olah data, olah informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh seluruh masyarakat (Hardyansyah, 2016). Dengan pengelolaan data secara terkomputerisasi akan meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa, dan tentunya dalam hal penyebaran maupun penyampaian informasi juga lebih mudah. Penelitian yang dilakukan oleh Komarasari (2017) dan Al-Shbail (2018) menunjukkan hasil pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan daerah.

H₅: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Menurut teori *stewardship*, *steward* tidak secara khusus termotivasi untuk tujuan individu tetapi lebih ditujukan kepada kepentingan organisasi atau sasaran utama yang

hendak dicapai. Untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya diperlukan aparatur desa yang kompeten, sehingga dengan diadakannya bimbingan teknis, aparatur lebih kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan dapat membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya. Menurut penelitian Wahyuningsih (2016), semakin sering pemerintah desa mendapat bimbingan teknis akan mendorong pada peningkatan tingkat akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

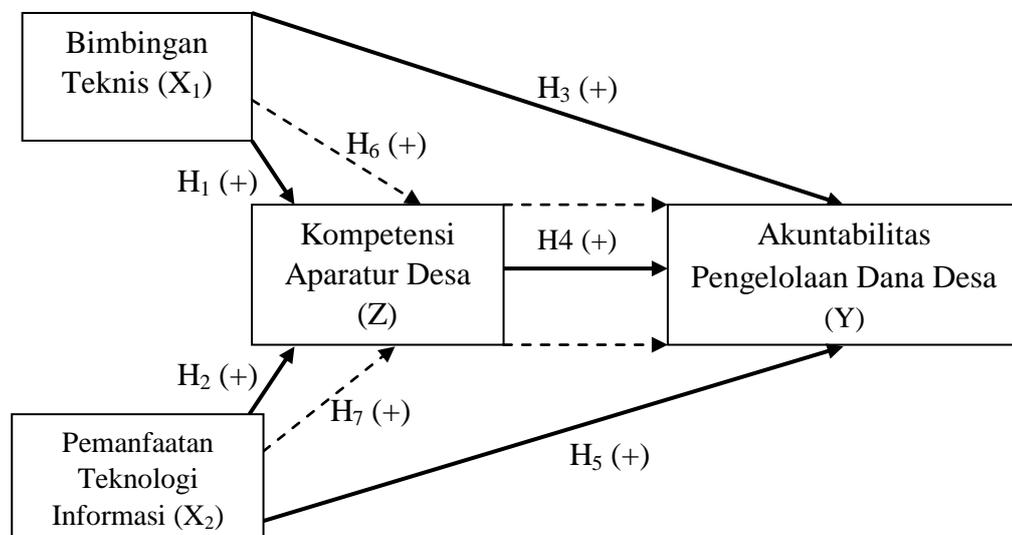
H₆: Bimbingan teknis berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dana desa akan mempermudah aparatur dalam mengolah dan mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat, hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dimana dengan memanfaatkan teknologi informasi, aparatur lebih terbantu dalam hal pengelolaan dana desa, sehingga aparatur akan dengan mudah menjalankan kewajibannya sebagai pemberi pelayanan sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat. (Andriani, 2012); (Komarasari, 2017); (Yadnya, et al., 2017).

H₇: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Model Penelitian



Skema Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Objek penelitian

Objek pada penelitian ini adalah desa yang terdapat di Kabupaten Temanggung.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan penyebaran kuesioner dan diolah menggunakan bantuan aplikasi SPSS.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik yang digunakan peneliti adalah kuantitatif yaitu data yang diperoleh dari angka dari perhitungan dan pengukuran. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel yang didasari dengan oleh kriteria tertentu. Kriteria itu yaitu:

1. Kecamatan dengan jumlah desa yang banyak, pelaporan LPJnya tepat waktu
2. Kecamatan dengan jumlah desa yang sedikit, pelaporan LPJnya tidak tepat waktu
3. Desa yang menerima Dana Desa
4. Responden yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu perangkat desa yang telah ditentukan oleh peneliti Kepala Desa, Sekretaris desa, Bendahara Desa.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini peneliti menggunakan metode teknik survey melalui penyebaran kuesioner. Survey adalah metode pengumpulan data secara primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden. Kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan daftar isian atau daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan disusun sedemikian rupa sehingga calon responden hanya tinggal mengisi atau menandainya dengan mudah dan cepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Objek dalam penelitian ini adalah desa-desa yang berada di Kabupaten Temanggung. Kabupaten Temanggung memiliki 266 desa dari 20 kecamatan, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 desa dari 3 kecamatan dan teknik pengambilan sampelnya adalah *purposive sampling*. Berikut ini adalah data desa sampel dalam penelitian:

Tabel 1
Data Desa Sampel

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
A	Kecamatan Bulu		
1	Bulu	2633	146.85
2	Tegallurung	1443	92.02
3	Campursari	2661	150
4	Gandurejo	5184	383.97
5	Tegalrejo	1725	183.63
6	Gondosuli	4310	251.99
7	Wonotirto	4060	544.33
8	Pagergunung	2520	388.62
9	Wonosari	2415	416.57
10	Bansari	3154	371.99
11	Pandemulyo	3417	322.67
12	Malangsari	1034	79.20
13	Mondoretno	1832	126.41
14	Pakurejo	1992	138.34
15	Pengilon	923	79.33
16	Pasuruhan	2598	225.42
17	Ngimbrang	1990	159.45
18	Putat	420	53.66
19	Danupayan	2890	189.51
B	Kecamatan Kedu		
1	Danurejo	3149	176.41
2	Salamsari	1773	139.04
3	Candimulyo	4742	262.32
4	Kedu	5368	351.74
5	Mojotengah	4484	201.78
6	Kutoanyar	3375	111.13
7	Tegalsari	3419	209.36
8	Kundisari	5085	241.01
9	Mergowati	4881	348.14
10	Karangtejo	2876	175.30
11	Ngadimulyo	5885	374.00
12	Gondangwayang	4768	269.54
13	Bojonegoro	3737	265.11
14	Bandunggede	4679	373.44

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Ha)
C	Kecamatan Tembarak		
1	Wonokerso	2651	204.36
2	Tembarak	1049	120.80
3	Menggoro	2995	185.04
4	Purwodadi	2287	205.64
5	Kemloko	3904	807.71
6	Tawang Sari	2012	162.23
7	Greges	1468	154.32
8	Botoputih	3095	228.95
9	Gandu	1519	113.85
10	Banaran	1868	66.43
11	Drono	1246	100.60
12	Krajan	1417	126.08
13	Jragan	2758	208.10

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung (2018)

Tabel 2
Distribusi Kuesioner

Keterangan	Jumlah
Total penyebaran kuesioner	135
kuesioner yang tidak kembali	10
Kuesioner yang kembali	125
Kuesioner yang dapat diolah	125
Tingkat pengembalian kuesioner	92,59%

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Demografi Responden

Berdasarkan 135 kuesioner yang telah disebarkan, berikut ini demografi responden yang dapat diketahui berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 3
Karakteristik Responden

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Laki-Laki	94	75,2%
	b. Perempuan	31	24,8%
2.	Usia		
	a. 20-35 tahun	21	16,8%
	b. 36-50 tahun	83	66,4%
	c. >50 tahun	21	16,8%

No	Karakteristik	Jumlah	Persentase
3.	Jabatan		
	a. Kepala Desa	43	34,4%
	b. Sekretaris	42	33,6%
	b. Bendahara	40	32%

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Hasil Uji Kualitas Data dan Analisis Data

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maksimum	Median	Mean	Std. Deviation
BT	125	18	30	24	25,31	2,431
PTI	125	27	35	31	31,25	2,191
KA	125	34	45	39,5	38,81	3,034
AK	125	20	25	22,5	22,71	1,921
<i>Valid N Listwise</i>	125					

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui gambaran jumlah jawaban yang diberikan oleh responden untuk tiap variabel penelitian. Dari tabel tersebut, dapat diketahui nilai minimum, maksimum, median, mean dan standar deviasi dari kuesioner yang di sebar.

Hasil Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Tabel 5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Nilai KMO	Standar Validitas	Keterangan
BT	0,803	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>
PTI	0,748	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>
KA	0,687	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>
AK	0,824	<i>Alpha 0,05</i>	<i>Valid</i>

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Suatu kuesioner dikatakan valid jika nilai Sig. (2-tailed) kurang dari $\alpha=0,05$ dan jika lebih dari $\alpha=0,05$ maka tidak valid Ghazali (2013). Berdasarkan tabel 5 hasil uji

validitas diatas dapat diketahui bahwa korelasi (r) dengan skor total tiap variabel $\geq 0,05$, sehingga seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner penelitian ini valid untuk mengukur masing-masing variabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach Alpha</i>	Standar Reliabilitas	Keterangan
BT	0,868	0,70	<i>Reliabel</i>
PTI	0,701		
KA	0,780		
AK	0,822		

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Uji reliabilitas dilakukan dilihat dari *cronbach alpha* (α) masing-masing instrumen penelitian. Suatu konstruk atau variabel dikatakan *realible* jika memberikan nilai *cronbach alpha* $\alpha \geq 0,70$, seperti yang dikemukakan oleh Ghozali (2013). Berdasarkan tabel 6 hasil uji reliabilitas diatas dapat diketahui bahwa seluruh nilai *cronbach's alpha* tiap variabel lebih dari nilai standar reliabilitas yang digunakan yaitu 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa kesungguhan responden dalam menjawab kuesioner cukup tinggi.

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas Substruktur 1
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,17016288
Most Extreme Differences	Absolute	,047
	Positive	,047
	Negative	-,040
Kolmogorov-Smirnov Z		,523
Asymp. Sig. (2-tailed)		,948

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 8
Hasil Uji Normalitas Substruktur 2
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		125
Normal Parameters(a,b)	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,39682389
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,039
Kolmogorov-Smirnov Z		,616
Asymp. Sig. (2-tailed)		,843

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 7 dan 8 uji normalitas yang telah dilakukan melalui uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test* untuk regresi substruktur 1 dan substruktur 2 diperoleh hasil *asymp sig. (2-tailed)* $0,948 > \alpha 0,05$ dan $0,843 > \alpha 0,05$, sehingga dapat di simpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 9
Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur 1

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
BT	0,945	1,058	Non Multikolinearitas
PTI	0,945	1,058	

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 10
Hasil Uji Multikolinearitas Substruktur 2

Variabel	<i>Collinearity Statistics</i>		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
BT	0,512	1,954	Non Multikolinearitas
PD	0,885	1,130	
SP	0,547	1,829	

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 9 dan 10 menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,01 atau nilai VIF lebih dari 10 yang artinya tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 11
Hasil Uji Heteroskedastisitas Substruktur 1

Variabel	Sig	Keterangan
BT	0,3565	Non Heteroskedastisitas
PTI	0,3381	

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 12
Hasil Uji Heteroskedastisitas Substruktur 2

Variabel	Sig	Keterangan
BT	0,4607	Non Heteroskedastisitas
PTI	0,6423	
KA	0,4633	

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 11 dan 12 menunjukkan tingkat signifikansi $>$ alpha 0,05, sehingga untuk uji heteroskedastisitas terpenuhi dan dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan tidak terkena heteroskedastisitas.

Hasil Uji Hiotesis

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13
Hasil Uji Koefisien Determinasi Substruktur 1

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,699(a)	0,488	0,480

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 13 hasil uji koefisien determinasi regresi untuk substruktur 1 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,488 yang artinya bahwa variabel independen BT dan PTI mampu menjelaskan variabel intervening KA sebesar 48,8% sisanya sebesar 51,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Tabel 14
Hasil Uji Koefisien Determinasi Substruktur 2

<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>
0,687(a)	0,471	0,458

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 14 hasil uji koefisien determinasi regresi untuk substruktur 2 dapat diketahui bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,458 yang artinya bahwa variabel independen BT, PTI, dan KA mampu menjelaskan variabel dependen AK sebesar 45,8% sisanya sebesar 54,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Hasil Uji F

Tabel 15
Hasil Uji F Substruktur 1

	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	557,401	2	278,700	58,223	,000(a)
<i>Residual</i>	583,991	122	4,787		
<i>Total</i>	1141,392	124			

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 16
Hasil Uji F Substruktur 2

	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	215,693	3	71,898	35,958	,000(a)
<i>Residual</i>	241,939	121	1,999		
<i>Total</i>	457,632	124			

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Tabel 15 dan 16 di atas menunjukkan bahwa nilai Sig F adalah sebesar $0,000 < \alpha 0,05$ dan $0,000 < \alpha 0,05$. Hal tersebut menjelaskan bahwa variabel-variabel independen mampu secara bersama-sama (simultan) memengaruhi variabel dependen.

Hasil Analisis Regresi Berganda

Tabel 17
Hasil Uji-t Regresi Substruktur 1

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	
(Constant)	5,539	3,152		0,081
Bimbingan Teknis	0,240	0,083	0,193	0,005
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,870	0,092	0,628	0,000

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 17 hasil regresi berganda untuk substruktur 1, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel bimbingan teknis 0,005 dan untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,000. Variabel bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki tingkat signifikansi $< \alpha$ 0,05 yang artinya hipotesis 1 dan hipotesis 2 diterima, dimana kedua variabel tersebut berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi aparatur desa.

Tabel 18
Hasil Uji-t Regresi Substruktur 2

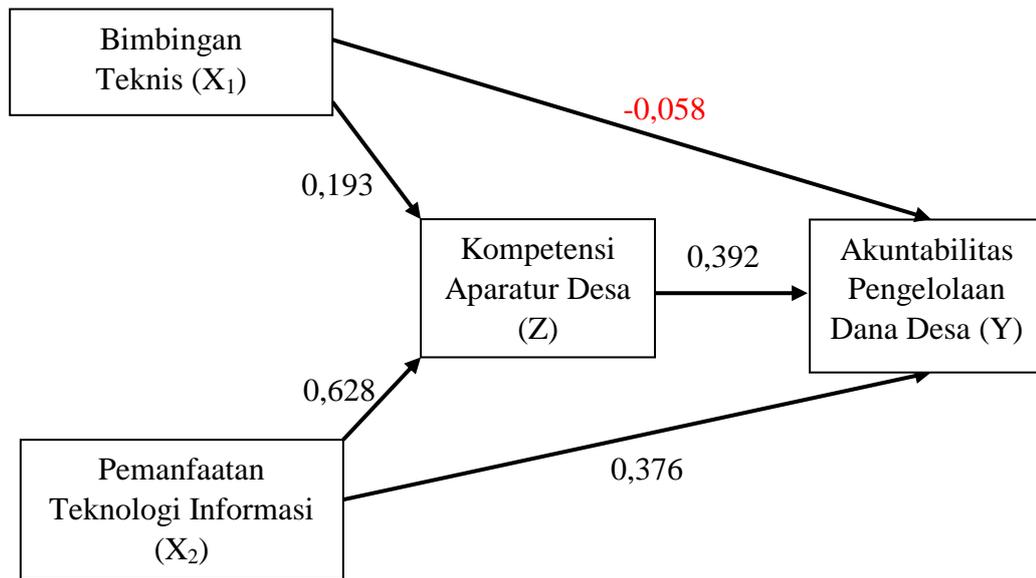
	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>	
(Constant)	3,940	2,063		0,058
Bimbingan Teknis	-0,046	0,056	-0,058	0,409
Kompetensi Aparatur Desa	0,248	0,059	0,392	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,330	0,078	0,376	0,000

Sumber: Data primer yang diolah (2019)

Berdasarkan tabel 18 hasil regresi berganda untuk substruktur 2, dapat diketahui untuk hipotesis 3 ditolak karena nilai signifikan $> \alpha 0,05$. Untuk hipotesis 4 dan 5 diterima karena nilai signifikan $< \alpha 0,05$.

Hasil Analisis Jalur

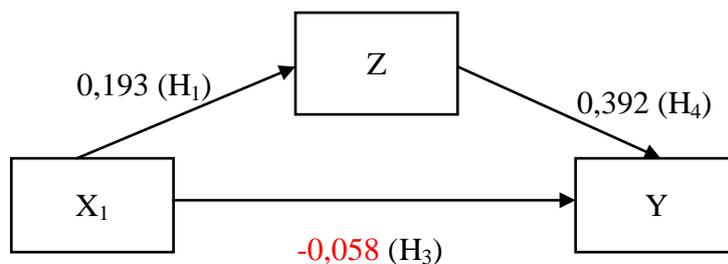
Berikut ini merupakan gambar sub struktur lengkap beserta analisis jalur model penelitian berdasarkan tabel 17 dan tabel 18:



Hasil Analisis Jalur

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan Hipotesis 6, yaitu:

- Hipotesis 1 dan hipotesis 4 harus diterima
- $H_1 * H_4 > H_3^2$



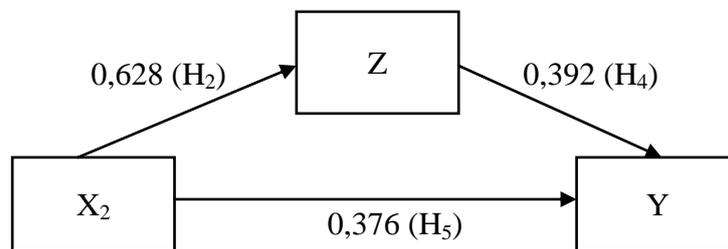
Hasil Analisis Jalur 1

$$\begin{aligned} (H_1 * H_4) &> H_3^2 \\ (0,193 * 0,392) &> -0,058^2 \\ 0,0757 &> 0,0034 \end{aligned}$$

Berdasarkan kedua syarat di atas dan hasil dari nilai uji t yang tersaji dalam tabel 17 dan 18, untuk syarat pertama yaitu hipotesis 1 dan hipotesis 4 harus diterima telah terpenuhi. Untuk syarat kedua dari hasil perhitungan di atas yaitu $0,0757 > 0,0034$, maka syarat kedua terpenuhi. Maka hipotesis 6 yang disebutkan bahwa bimbingan teknis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa dinyatakan **diterima**.

Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi untuk diterimanya penurunan Hipotesis 7, yaitu:

- Hipotesis 2 dan hipotesis 4 harus diterima
- $H_2 * H_4 > H_5^2$



Hasil Analisis Jalur 2

$$\begin{aligned} (H_2 * H_4) &> H_5^2 \\ (0,628 * 0,392) &> 0,376^2 \\ 0,2462 &> 0,1414 \end{aligned}$$

Berdasarkan kedua syarat di atas dan hasil dari nilai uji t yang tersaji dalam tabel 17 dan 18, untuk syarat pertama yaitu hipotesis 2 dan hipotesis 4 harus diterima telah terpenuhi. Untuk syarat kedua dari hasil perhitungan di atas yaitu $0,2462 > 0,1414$, maka syarat kedua terpenuhi. Maka hipotesis 7 yang disebutkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa dinyatakan **diterima**.

Pembahasan

Pengaruh bimbingan teknis terhadap kompetensi aparatur desa

Hasil pengujian hipotesis pertama (H₁) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan pada bimbingan teknis terhadap kompetensi aparatur desa, sehingga H₁ **diterima**. Menurut Widodo (2015), pelatihan merupakan serangkaian proses seseorang dalam meningkatkan kompetensi, keahlian dan pengetahuan secara sistematis dan terorganisir sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Dengan seringnya aparatur desa yang berada di kecamatan Bulu, Tembarak dan Kedu mendapatkan bimbingan teknis atau pelatihan maka itu telah meningkatkan kompetensi aparatur desa, sehingga setiap masalah yang dihadapi, pekerjaan atau tugas yang diterima tentunya dapat terpecahkan dan terselesaikan sesuai dengan tujuan dari desa.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kompetensi aparatur desa

Hasil pengujian hipotesis kedua (H₂) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap kompetensi aparatur desa, sehingga H₂ **diterima**. Alkaaran (2018), dengan memanfaatkan teknologi informasi memudahkan pegawai dalam penyusunan anggaran, pengambilan keputusan strategis, membuat perkiraan pendapatan, menindaklanjuti pelaksanaan anggaran yang telah dilakukan, serta mempersiapkan dan mengirimkan segala penggunaan anggaran tersebut.

Dalam penelitian ini, setiap desa yang ada di kabupaten Temanggung, utamanya di desa yang berada di kecamatan Bulu, kecamatan Kedu dan kecamatan Tembarak sudah dilengkapi dengan teknologi informasi, seperti komputer (*hardware* dan *software*) dan jaringan internet. Dengan adanya teknologi informasi tersebut telah memudahkan aparatur desa dalam menyelesaikan tugasnya dalam proses akuntansi yaitu dapat mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, merekap pemasukan dan pengeluaran dana, maupun dalam hal penyebaran informasi penggunaan dana tersebut kepada otoritas yang lebih tinggi maupun nantinya kepada masyarakat.

Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh pada bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_3 **ditolak**. Hal ini bisa dikarenakan bimbingan yang dilakukan tidak semata-mata bisa langsung berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, harus ada faktor-faktor lain untuk bisa mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa ini. Faktor lain disini bisa seperti aparatur desa yang mengikuti bimbingan tersebut. Fenomena yang terjadi di desa di kecamatan Bulu, Kedu dan Tembarak sesuai dengan penelitian memang dalam hal bimbingan teknis sudah dilakukan pemerintah guna mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Namun tentunya bimbingan ini harus diikuti oleh aparatur desa yang tepat atau sesuai dengan bidangnya. Karena apabila tidak sesuai atau materi yang di sampaikan tidak bersangkutan dengan kebutuhan yang ada atau dalam penelitian ini akuntabilitas pengelolaan dana desa, maka bimbingan teknis ini tentunya tidak akan berpengaruh.

Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan pada kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_4 **diterima**. Mada, dkk (2017) menyatakan aparatur desa yang kompeten akan menghasilkan output yang baik yang sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, aparatur desa tiap desa di kecamatan Bulu, Kedu dan Tembarak telah memiliki kompetensi dalam menjalankan akuntabilitas pengelolaan dana desa sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif signifikan pada pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_5 **diterima**. Semakin dimaksimalkan dalam memanfaatkan teknologi informasi, akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan pengujian dalam penelitian ini, desa di kecamatan Bulu, Kedu dan Tembarak telah memanfaatkan teknologi informasi untuk menciptakan akuntabilitas

dalam pengelolaan dana desa. Setiap desa telah menggunakan aplikasi siskeudes guna memudahkan dalam penatausahaan dan pelaporan pengelolaan dana desa, sehingga akuntabilitas akan terpenuhi.

Pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Berdasarkan hasil uji analisis jalur didapatkan bahwa koefisien bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa sebesar 0,0757 lebih besar dari *standardize coefficient* langsung sebesar 0,0034. Jalur yang tepat pada pengaruh bimbingan teknis terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah jalur tidak langsung, sehingga hipotesis keenam dinyatakan **diterima**. Dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan dipadukan dengan kompetensi yang dimiliki aparatur desa akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan meningkatnya kompetensi yang dimiliki aparatur desa yang berada di setiap desa di kecamatan Bulu, Kedu dan Tembarak akibat diadakannya bimbingan teknis tentunya akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Meningkatnya akuntabilitas ini bisa dilihat dari setiap desanya membuat pertanggungjawaban mengenai pengelolaan dana desa dengan membuat banner yang menggambarkan dana masuk dan keluar yang berada di desa tersebut.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa, dengan demikian H_7 **diterima**. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal melalui kompetensi aparatur desa lebih berpengaruh terhadap meningkatnya akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tersedianya teknologi informasi di setiap desa yang ada di kecamatan Bulu, Kedu dan Tembarak sangat memengaruhi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dikarenakan menggunakan teknologi informasi lebih mudah daripada penggunaan metode manual. Dalam pengelolaan dana desa sendiri sudah terdapat aplikasi seperti Siskeudes yang memudahkan aparat dalam mengelola dana desa.

SIMPULAN, SARAN, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Temanggung yang berjumlah 266 desa dari 20 kecamatan, jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 47 desa dari 3 kecamatan dengan teknik pengambilan sampelnya adalah *purposive sampling*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kompetensi aparatur desa. bimbingan teknis tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun kompetensi aparatur desa dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa melalui kompetensi aparatur desa.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan peneliti dapat menambahkan variabel lain yang dinilai berpengaruh terhadap variabel terikat, yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal tersebut dikarenakan pengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 45,8% sehingga masih terdapat 54,2% dari variabel-variabel diluar model. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya juga menggunakan metode wawancara secara langsung untuk mengumpulkan data penelitian. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian dan memperluas objek penelitian.

Pada penelitian ini juga terdapat beberapa keterbatasan, diantaranya adalah Penelitian yang dilakukan ini hanya menggunakan dua variabel independen, yaitu bimbingan teknis dan pemanfaatan teknologi informasi. Pada penelitian ini hanya menggunakan sampel di desa yang berada di tiga kecamatan, yaitu kecamatan Bulu, Kedu, dan Tembarak. Sehingga hasil dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini tidak dapat di aplikasikan atau di realisasikan untuk seluruh wilayah desa yang ada di Indonesia. Penelitian ini hanya menggunakan metode survey dengan membagikan kuesioner tanpa ikut terlibat langsung dengan melalui wawancara, sehingga informasi yang disampaikan oleh responden rentan terhadap bias.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, W. 2012. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kab. Pesisir Selatan). *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 5(1), 69–80.
- Al-Shbail, Tariq and Aini Aman. 2018. *E-government and accountability: How to mitigate the disorders and dysfunctions of accountability relationships*. *Journal Transforming Government: People, Process and Policy*. Vol. 12 No. 2. pp. 155-190.
- Alkaraan, Fadi. 2018. *Public Financial Management Reform: An Ongoing Journey Towards Good Governance*. *Journal of Financial Reporting and Accounting*. Vol. 16 No. 4. pp. 585-609.
- Atmodiwirio, Soebagio. 1993. *Manajemen Training (Pedoman Praktis Bagi Penyelenggaraan Training)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Azlina, Nur, dkk. 2017. *The Effectiveness of Village Fund Management (Case Study at Villages in Coastal Areas in Riau)* *International Journal of Economic Research*. Volume 14. Number 12. ISSN : 0972-9380
- Bolung, Rio Vicky, dkk. 2018. Pengaruh Pelatihan Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai BPMPD Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol.6 No.3 Juli 2018. ISSN 2303-1174
- Boyatzis, Richard E. 2008. *Competencies in The 21st Century*, *Journal of Management Development*. Vol. 27 No.1, pp. 5-12
- Direktorat Penelitian Dan Pengembangan. 2015. Laporan Kajian Sistem Pengelolaan Keuangan Desa: Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. 1991. *Stewardship Theory Or Agency Theory: Ceo Governance And Shareholder Returns*. *Australian Journal Of Management*, 16(1), 49–64.
- Ghozali, Imam. 2013. *Analisis Multivariate Program Ibm Spss 21*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah. 2016. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Skpd Kabupaten Polewali Mandar). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Kadir, Abdul. 2017. *The Indonesian Perspectives On Village Financial Management Accountability. International Journal Of Economics, Business And Management Research*, Vol. 1, No. 04; 2017. ISSN: 2456-7760.
- Komarasari, W. 2017. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan). *Repository UPY*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 106–115.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Cv Andi Offset.
- Munti, Finta. & Heru Fahlevi. 2017. Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Nadir, Sakinah. 2013. Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Desa. *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor 1.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pramudiarta, Rizal. 2015. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Entitas Akuntansi Pemerintah Daerah (Studi Persepsi Pegawai Skpd Di Kabupaten Batang Dan Kabupaten Kendal). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Setiana, Dwi Novindra. dan Nur Laila Y. 2017. Pengaruh Pemahaman Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Siriwardhane, Pavithra and Dennis Taylor. 2017. *Perceived Accountability For Local Government Infrastructure Assets: The Influence Of Stakeholders. Pacific Accounting Review*. Vol. 29 No. 4. pp. 551-572.
- Sugiarti, E., dan Yudianto, I. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa Di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya. Universitas Widiatama.

- Temenggung, Yuswandi A. *Rural Financial Management In Perspective Law No. 6 Of 2014 Concerning The Village. International Journal Of Social Sciences*. Vol.43. No.1 ISSN: 2305-4557.
- Trisaputra, A. 2013. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Pemerintah Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Akuntansi*, 1.
- Wahyuddin. 2016. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Desa Ako Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara. *E Jurnal Katalogis, Volume 4 Nomor 5*, Mei 2016 Issn: 2302-2019 Hal 141-149.
- Wahyuningsih Putri & Kiswanto. 2016. *Factors Affecting The Accountability Of Village Financial Management. Accounting Analysis Journal* 5 (3) (2016). ISSN 2252-6765.
- Wardani, Dewi Kusuma dan Ika Andriyani. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi* Vol. 5 No. 2. E-Issn: 2540-9646.
- Widarnawati, Baiq Wiwik, dkk. 2018. *Factors Affecting Of Village Financial Management And Its Implications For Stakeholders Trust (Study On Villages In Central Lombok, Indonesia) . International Journal of Economics, Commerce and Management United Kingdom*. Vol. VI, Issue 3. ISSN: 2348 0386
- Widodo, S. E. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wilkinson, W. Joseph, dkk. 2000. *Accounting Information Systems: Essential Concepts And Applications*. Fourth Edition. John Wiley And Sons. Inc.
- Yadnya, N. W. A., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. 2017. Pengaruh Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 8.
- Yusuf, Muhammad. 2016. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Keterandalan Dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Akuntansi dan Pembangunan* Vol. 2 No. 1 Februari 2016.